

BAB I

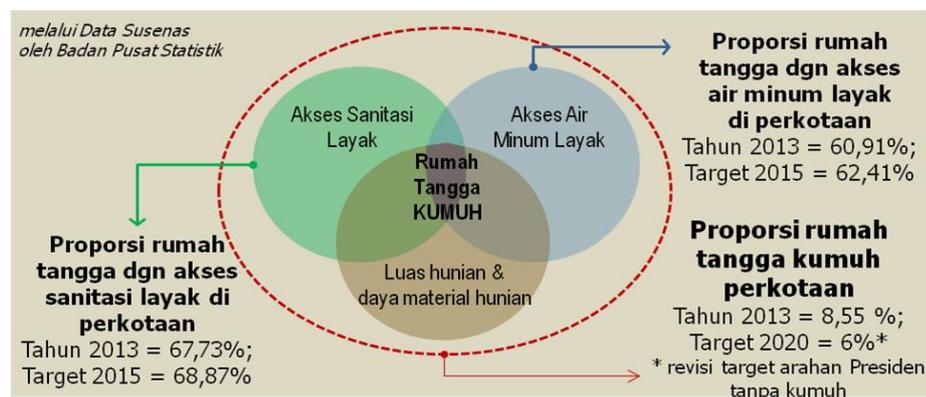
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kementerian PUPR) menyelenggarakan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai upaya strategis dalam mengurangi daerah kumuh di seluruh bagian Indonesia. Disamping itu, program ini sebagai langkah pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Arah kebijakan diadakannya program ini adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan komunitas. Program Kotaku bertujuan untuk mengurangi kekumuhan dengan membangun *platform* kolaborasi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Program ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program Kotaku di 34 provinsi yang tersebar di 269 Kabupaten/ Kota, yaitu pada 11.067 desa/ kelurahan dengan total luas keseluruhan 23.656 Ha (<http://kotaku.pu.go.id>). Tahapan pelaksanaan Program ini adalah melalui pendataan terhadap lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan (Badan Keswadayaan Masyarakat) terhadap 7 (tujuh) indikator kumuh di Desa/Kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan

masyarakat dan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota untuk menentukan kegiatan prioritas dalam mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru serta rumah tangga kumuh. Pemerintah menargetkan pada Tahun 2020 proporsi rumah tangga kumuh perkotaan dapat menurun menjadi 6% dari sebelumnya 8,55% (pada Tahun 2013). Target pemerintah dalam mengurangi rumah tangga kumuh tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS.go.id (diolah, 2019)

Gambar 1.1
Proporsi Target dalam Mengurangi Rumah Tangga Kumuh

Pada tingkat Kabupaten/Kota program ini dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, diantaranya Satker/PPK Kabupen/Kota (termasuk koordinator Kota dan fasilitator), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), relawan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat Kelurahan/Desa. BKM merupakan lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani

(*civil socitey*), yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (*value based*). Pengawasan dan evaluasi terus dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan program ini, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh.

Program Kotaku di Jawa Barat terdiri dari Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (27 Kota/Kabupaten; 123 Kecamatan; 3.933 Desa/Kelurahan) serta Program Pencegahan dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (25 Kota/Kabupaten; 179 Kecamatan; 1.308 Desa). Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memperoleh program Kotaku. Kabupaten Ciamis secara geografis berada pada wilayah Provinsi Jawa Barat. Program Kotaku di Kabupaten Ciamis dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan dan 21 (dua puluh satu) Desa/Kelurahan yang difasilitasi program Kotaku, baik itu pada program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Desa/Kelurahan untuk program Pencegahan dan Berkembangnya Permukiman Kumuh. Berikut adalah rincian Kelurahan/Desa di Kabupaten Ciamis yang mendapatkan Program Kotaku.

Tabel 1.1
Kelurahan/Desa Program Kotaku Kabupaten Ciamis

No (1)	Kecamatan (2)	Desa/Kelurahan (3)
1	Sindangkasih	1. Sindangkasih 2. Sukasenang 3. Sukaraja 4. Sukaresik 5. Sukamanah 6. Budiasih 7. Budiharja 8. Gunungcupu 9. Wanasigra

(1)	(2)	(3)
2	Ciamis	1. Ciamis 2. Maleber 3. Kertasari 4. Cisadap 5. Imbanagara Raya 6. Imbanagara 7. Pawindan 8. Panyingkiran 9. Sindangrasa 10. Benteng 11. Cigembor 12. Linggasari

Sumber: Program Kotaku Kab. Ciamis (2019)

Tujuan dari program Kotaku tidak lain adalah mengurangi jumlah wilayah Kota kumuh yang mencapai 11.067 Desa/Kelurahan dengan total wilayah seluas 23.656 Ha. Program ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan infrastruktur Indonesia sebesar 4,1% per tahun dan merupakan pertumbuhan paling tinggi di Kawasan Asia (<http://kotaku.pu.go.id>). Pencapaian ini menandakan kinerja dari Program Kotaku sesuai dengan harapan. Kinerja diartikan sebagai kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (*output*) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi (Umam, 2010: 189).

Kinerja program Kotaku berdasarkan pada kinerja pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan program tersebut. Kinerja setiap penyelenggara program sangat menentukan keberhasilan program Kotaku. Kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya. Selain itu, kinerja juga diartikan sebagai perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi (Mangkunegara, 2011: 67). Kepemimpinan menjadi faktor yang paling vital dalam pelaksanaan pekerjaan suatu organisasi, tidak terkecuali pada program Kotaku. Keberhasilan program ini tidak lain bergantung pada pemimpin program, yang tidak lain merupakan koordinator Kabupaten/Kota pelaksana program Kotaku di Kabupaten Ciamis.

Dari hasil observasi awal peneliti tentang penerapan gaya kepemimpinan yang berjalan pada program Kotaku adalah pemimpin mempunyai tanggung jawab menciptakan stimulus dalam memotivasi pelaksana program dalam mencapai tujuan program. Agar pelaksanaan program ini sesuai dengan target, maka harus ada kerjasama antara pelaksana program. Namun, tidak semua instruksi pimpinan tidak semuanya berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan masih ada beberapa pegawai yang tidak bekerja dengan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana program di lapangan. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari absensi pegawai yang sering bolos kerja dengan alasan yang kurang jelas sehingga menghambat pekerjaan dan menurunnya kualitas dari penyelenggaraan program. Fungsi seorang pimpinan adalah sebagai katalis dan fasilitator dari proses komunikasi, pembelajaran dan kepemimpinan. Pemimpin menciptakan konteks untuk memilih orang-orang yang relevan, membantu mereka untuk mengatasi hambatan, dan mempercepat realisasi visi dari program Kotaku.

Bentuk kepemimpinan pada program Kotaku yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang menginspirasi para pengikut untuk

melampaui kepentingan pribadi mereka yang mampu membawa dampak mendalam dan luar biasa pada para pengikut (Robbins & Timothy, 2011: 172). Tipe kepemimpinan ini memberikan stimulan kepada masyarakat selaku pelaksana maupun pihak lain yang terkait untuk memandang pekerjaan dari prespektif baru, menumbuhkan kepedulian terhadap visi dan misi dari tim kerja dan organisasi, mengembangkan tim pelaksana Program Kotaku agar memiliki kemampuan dan potensi yang tinggi, memotivasi untuk melakukan suatu hal secara berbeda dari biasanya, memberikan harapan-harapan yang lebih menantang, dan terus mendorong pencapaian kinerja organisasi yang lebih tinggi.

Dalam sebuah organisasi, pemimpin hendaknya dapat melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, sehingga berdampak kepada penyaluran aspirasi bawahannya, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan bawahan dalam berinteraksi, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Selain kepemimpinan, kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang dilakukan antara koordinator dan BKM. Komunikasi diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud (Mangkunegara, 2011: 168). Disamping itu, pembelajaran organisasi diperlukan sebagai langkah sosialisasi dan edukasi terhadap program Kotaku.

Pengetahuan terhadap program ini dan pengetahuan organisasi wajib dimiliki oleh setiap entitas, baik pemerintah, konsultan pendamping/fasilitator dan

lembaga BKM/LKM sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian diharapkan mampu menciptakan terbentuknya lingkungan pembelajaran yang kondusif sehingga memotivasi pelaksana program Kotaku untuk terus belajar, memanfaatkan informasi untuk mengembangkan pengetahuan individu dalam menjalankan program Kotaku ke depannya. Pembelajaran organisasi menunjukkan bahwa organisasi telah mempelajari apa yang harus dipelajari untuk dapat meningkatkan kinerja lebih baik. Program ini harus berorientasi pada pembelajaran yaitu kemauan untuk belajar. Pembelajaran organisasi merupakan proses belajar terus menerus dari setiap individu organisasi dimana pola pikir ditumbuhkan, aspirasi bersama dibiarkan secara bebas dan anggota-anggotanya secara terus menerus dan belajar bersama yang dibangun dan keahlian organisasi diciptakan dan diperoleh ditransformasikan dan bertujuan untuk mengembangkan wawasan baru. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini diberi judul “Kepemimpinan Transformasional, Komunikasi dan Pembelajaran Organisasi Sebagai Determinan Kinerja (Kasus pada Program Kotaku di Kabupaten Ciamis)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan transformasional, komunikasi organisasi, pembelajaran organisasi dan kinerja pada program Kotaku di Kabupaten Ciamis;

2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional, komunikasi dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pada program Kotaku di Kabupaten Ciamis baik secara parsial maupun secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai program Kotaku di Kabupaten Ciamis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Kepemimpinan transformasional, komunikasi organisasi, pembelajaran organisasi dan kinerja pada program Kotaku di Kabupaten Ciamis;
2. Pengaruh kepemimpinan transformasional, komunikasi dan pembelajaran organisasi sebagai determinan kinerja pada program Kotaku di Kabupaten Ciamis baik secara parsial maupun secara simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan, terutama bagi semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Ciamis.

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam bidang kepemimpinan, komunikasi dan pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kinerja.

b. Bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program Kotaku di lapangan. Oleh sebab itu manfaat yang diharapkan adalah mampu melaksanakan semua arahan dalam pelaksanaan program Kotaku berdasarkan dengan petunjuk dan teknis dari pusat. Disamping itu, para anggota BKM dapat mempelajari hal yang baru dalam mengurangi kawasan kumuh di wilayahnya.

c. Bagi Fasilitator

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, fasilitator mampu menjalin komunikasi yang efisien dalam menyampaikan pesan sehingga menghindari disinformasi dan kesalahfahaman dalam melaksanakan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program Kotaku.

d. Bagi Satuan Kerja (Satker) dan Pemerintah

Diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan memberikan masukan serta saran dalam upaya meningkatkan kinerja program Kotaku.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi, pada khususnya *civitas academika* Universitas Siliwangi dalam hal sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia terutama ilmu tentang kepemimpinan, komunikasi organisasi, pembelajaran organisasi dan kinerja;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan manajemen SDM yang relevan dengan kondisi saat ini (*up to date*); serta
- c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kinerja melalui kepemimpinan transformasional, komunikasi organisasi dan pembelajaran organisasi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ciamis pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April 2020 (Terlampir).